

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I  
TAHUN ANGGARAN 2017-2019**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program  
Studi Keuangan Perbankan Jenjang Diploma III

Disusun Oleh :

**NIA NURCAHYATI**

**1011171013**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANGGA BUANA  
BANDUNG  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Tugas Akhir : “ Analisis Laporan Keuangan pada Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Bandung I Tahun Anggaran  
2017 – 2019.”

Nama : Nia Nurcahyati  
NPM : 1011171013  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Fakultas : Ekonomi  
Perguruan Tinggi : Universitas Sangga Buana YPKP Bandung  
Lama Penelitian : 4 (Empat) Bulan

Telah disetujui oleh pembimbing dan penguji

tertera tanggal

Bandung, 18 Agustus 2020

**Pembimbing**



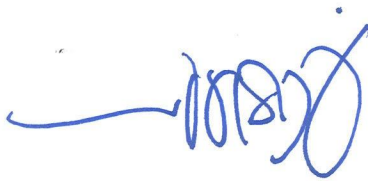
**Eva Rachmawati., SE.,MM.,**

Mengetahui,

**Direktur Vokasi**

**Ketua Prodi**

**DIII Keuangan & Perbankan**



**Ahmad Munandar., ST., M.T**



**H. Rusmin Nuryadin.,SE.,M.Si**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nia Nurcahyati  
NPM : 1011171013  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Laporan Keuangan Pada KPPN  
Bandung I Tahun Anggaran 2017 -2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini bukan merupakan plagiatisme karya milik orang lain. Tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kelulusan gelar ahli madya di suatu perguruan tinggi.

Bandung, 24 Juli 2020

  
  
Nia Nurcahyati

Penulis

## **ABSTRAK**

### **“Analisis Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I Tahun Anggaran 2017-2019”**

Analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik dilakukan dengan cara membandingkan kinerja keuangan satu periode dengan periode sebelumnya berdasarkan laporan keuangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Bandung I berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 menggunakan analisis aset dan analisis rasio keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, jenis data kuantitatif sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perbandingan pertumbuhan aset yang baik terjadi pada tahun 2017-2018. Terjadi penurunan pada tahun 2018-2019. Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan pun mengalami peningkatan yang baik.

Kata Kunci : Analisis, Laporan Keuangan

## **ABSTRACT**

*"Analysis of Financial Statements at Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I for 2017-2019 Fiscal Year"*

*Analysis of financial statements in public sector organizations is done by comparing the financial performance of one period with the previous period based on the financial statements.*

*The purpose of this study was to determine the financial performance of KPPN Bandung I based on 2017-2019 financial statements using asset analysis and financial ratio analysis. This type of research used in this research is quantitative descriptive, type of quantitative data sources of data in this study are secondary. Data collection techniques used were field research and library research.*

*The results obtained from this study are that a good comparison of asset growth occurred in 2017-2018. A decrease in 2018-2019. From the results of the calculation of the financial ratio analysis also experienced a good increase.*

*Keywords : Analysis, Financial Statements*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Laporan Keuangan Pada KPPN Bandung I Tahun Anggaran 2017–2019”**. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Studi Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi pada Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha memberikan yang terbaik. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna kelengkapan dan kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa jurusan Keuangan dan Perbankan pada umumnya.

Dengan rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Entang Halimin dan Ibu Komariah yang senantiasa memberi doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan baik secara moril maupun materil. Serta rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Eva Rachmawati, SE., MM., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga Laporan tugas ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Asep Effendi R., SE., M.Si., PIA.,CfrA., CRBC, selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
2. Bapak Dr. Ir. Didin Kusdian., MT, selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Ibu Memi Sulaksmi, SE., M.Si, selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Bapak Dr. Deni Nurdyana Hadimin, Drs., M.Si, selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Bapak Ahmad Munandar., ST., M.T, selaku Direktur Vokasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Bapak H. Rusmin Nuryadin., SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Ibu Lucy Nurfadillah.,SE.,MM., Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
9. Bapak Surya Ansori.,SE.,MM., yang telah membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi.
10. Bapak Asep Jamaludin.,SE.,MM., yang telah membantu penulis mempersiapkan proses awal penulisan Tugas Akhir.

11. Bagian SDM dan Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I (KPPN) yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Bapak Urip Handoko, selaku kepala seksi Subbag Umum, Bapak Sugeng dan Bapak Syahrial yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing memberikan data guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
13. Kakak tercinta M.Muzibul R dan Pusvita Irawati yang telah memberikan doa, nasihat, dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Saudaraku Dian Fitriani, Rahma Putri, Hani Apriani, Arsyifa Oktaviani yang selalu memberikan dukungan, saran, motivasi, mendoakan dan membantu penulis.
15. Teman-teman Diploma III Keuangan Perbankan angkatan 2017, Dina Kharisma Putri, Rosi Herawati, Ajeng Griya, Elvita Purnama, Ayang Hesti, Elisa Murni, Meidiana, Ayu, Mutiara,
16. Lembaga Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berlembaga.
17. Genta Sabdalillah yang telah menemani, mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
18. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis selama menyusun Tugas Akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dan



semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan kita serta terus membimbing agar istiqomah di jalan-Nya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 24 Juli 2020

Penulis,

Nia Nurcahyati

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PENGESAHAN

### LEMBAR PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Maksud Penelitian .....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6

1.4.2.1 Bagi Peneliti .....	6
1.4.2.2 Bagi Instansi .....	6
1.4.2.3 Bagi Pembaca .....	6
1.5 Peneliti Terdahulu .....	7
1.6 Metodologi Penelitian .....	8
1.6.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan .....	8
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.7 Tempat dan Waktu Penelitian .....	9
1.7.1 Tempat Penelitian .....	9
1.7.2 Waktu Penelitian.....	10
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Laporan Keuangan .....	11
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	11
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	12
2.1.3 Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik .....	14
2.2 Analisis Laporan Keuangan .....	16
2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan .....	16
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan .....	17
2.2.3 Metode Analisis Laporan Keuangan .....	18

2.3 Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik .....	19
2.3.1 Pihak – pihak berkepentingan Analisis Laporan Keuangan Daerah..	19
2.3.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik .....	20
2.3.3 Analisis Aset .....	22
2.4 Analisis Rasio Keuangan .....	24
2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Hasil Penelitian .....	28
3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	28
3.1.1.1 Sejarah KPPN Bandung I .....	28
3.1.1.2 Visi dan Misi KPPN Bandung I .....	29
3.1.1.3 Struktur Organisasi KPPN Bandung I .....	29
3.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi KPPN Bandung I .....	30
3.1.1.5 Wilayah dan Mitra Kerja KPPN Bandung I .....	32
3.2 Pembahasan .....	34
3.2.1 Analisis Aset .....	34
3.2.2 Analisis Rasio Keuangan.....	41

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Time Schedule</i> .....	10
Tabel 3.1	Perbandingan Nilai Pos Aset Neraca KPPN Bandung I TA 2017-2018.....	36
Tabel 3.2	Prporasi Kelompok Aset Terhadap Total Aset Neraca KPPN Bandung I TA 2017-2019.....	37
Tabel 3.3	Perbandingan Nilai Pos Aset Neraca KPPN Bandung I TA 2018-2019.....	39
Tabel 3.4	Modal Kerja Neraca KPPN Bandung I Ta 2017-2019.....	40
Tabel 3.5	Rasio Lancar Neraca KPPN Bandung I Ta 2017-2019.....	42
Tabel 3.6	Rasio Kas Neraca KPPN Bandung I Ta 2017-2019.....	44
Tabel 3.7	Rasio Cepat Neraca KPPN Bandung I Ta 2017-2019.....	46
Tabel 3.8	Rasio <i>Working Capital to Assets</i> Neraca KPPN Bandung I Ta 2017-2019.....	48
Tabel 3.9	Rasio Solvabilitas Neraca KPPN Bandung I Ta 2017- 2019.....	50
Tabel 3.10	Rasio Utang terhadap Ekuitas Neraca KPPN Bandung I Ta 2017-2019.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Daftar Gambar	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan	30
3.1.1.3	Negara Bandung I .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di zaman globalisasi ini telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi sudah demikian maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu, maka kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu hal yang mutlak.

Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Salah satu tugas Pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang – bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan



masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas adalah kunci pelayanan publik. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan hubungan pertanggung jawaban yang diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Unsur-unsur laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan analisis laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo. Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan analisis laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos – pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja menegerial dan organisasional.

Menurut Widodo dalam Halim (2007: 231), penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik dilakukan dengan cara membandingkan kinerja keuangan satu periode dengan periode sebelumnya berdasarkan laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik dalam analisis laporan keuangan, yaitu antara lain: analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan, analisis belanja, analisis pembiayaan, dan analisis laporan arus kas. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menggambarkan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu organisasi sektor publik selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia (RI) yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penatausahaan penerimaan negara dan pertanggungjawaban pelaksana anggaran. Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka menuju tata laksana kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), KPPN sebagai salah satu aparatur negara telah melakukan perubahan paradigma layanan dengan cara memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, tanpa biaya serta proses pekerjaan yang transparan (Dirjen Perbendaharaan, 2018).

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui pelayanan KPPN menggunakan analisis laporan keuangan pada laporan keuangan KPPN BANDUNG I. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN BANDUNG I TAHUN ANGGARAN 2017-2019”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Bandung I berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 menggunakan analisis aset?
2. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Bandung I berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 menggunakan analisis rasio keuangan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengungkap Analisis Laporan Keuangan Pada KPPN Bandung I Tahun Anggaran 2017-2019. Hasil dari tulisan ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa laporan Tugas Akhir, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Jenjang Pendidikan D3 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Bandung I berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 menggunakan analisis aset.

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Bandung I berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 menggunakan analisis rasio keuangan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dengan Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang keuangan. Khususnya tentang Analisis Laporan Keuangan pada KPPN Bandung I Tahun Anggaran 2017-2019.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

###### **1.4.2.1 Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman dalam penerapan ke dalam dunia praktis, Keuangan.

###### **1.4.2.2 Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan (informasi) khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

###### **1.4.2.3 Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

1. Nurhayati,S Ak (2016) dalam penelitiannya Tentang Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari penelitian ini adalah rasio utang dan pendapatan daerah menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan jaminan pendapatan daerah dalam membayar keseluruhan utang memiliki resiko rendah karenanya nilainya kurang dari satu tahun.
2. hal Hakim,SE (2018) judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 – 2016, tujuan penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan yang ada di pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan yaitu berupa analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dikatakan rendah. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yaitu dalam persamaan, sama – sama menganalisis Kinerja Keuangan di pemerintahan sedangkan dalam perbedaan terdapat dalam objek dan metode yang dipakai.
3. Rahayu (2018) dengan judul penelitian Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat: Studi Komparatif Tiga Periode Hasil yang diperoleh

dari penelitian ini adalah bahwa tingkat rasio likuiditas yang tertinggi terjadi pada tahun 2008, rasio solvabilitas atas ekuitas yang terendah terjadi pada tahun 2006, rasio solvabilitas atas aset yang terendah terjadi pada tahun 2012, rasio efektifitas pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008, rasio efisiensi belanja terendah terjadi pada tahun 2016, tingkat pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008, dan tingkat pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2008. Nilai aset dan kewajiban tertinggi berada pada tahun 2016. Nilai ekuitas tertinggi berada pada tahun 2015. SiLPA tertinggi diperoleh pada tahun 2008. Untuk opini audit BPK, pada tahun 2016, LKPP pertamakalinya memperoleh opini wajar tanpa penecualian.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Metode Penelitian yang Digunakan**

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi suatu kondisi dengan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk data-data yang ada pada laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu meminta data yang sudah ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1.

jenis penelitian ini jika dilihat dari tingkat eksplanasinya yaitu deskriptif.

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:11) menyatakan bahwa :

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.”

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Observasi (*Observation*)

Dalam proses penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi partisipasi pasif artinya penulis melakukan penelitian secara langsung di instansi terkait tetapi tidak terlibat dalam kegiatan instansi tersebut.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan pengambilan data yang diperoleh dari buku dan literatur atau tulisan lainnya yang mempunyai hubungan dengan Analisis Laporan Keuangan.

## **1.7 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1.7.1 Tempat Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara “K” Lantai 1 Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung 40261





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Salah satu bentuk informasi yang digunakan untuk melihat dan menilai perkembangan kinerja perusahaan ialah laporan keuangan. Perusahaan tentunya mempunyai tanggung jawab atas penyajian laporan keuangan kepada pihak yang terkait. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi.

Menurut Munawir.S (2015:5), Laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

Menurut Irham Fahmi (2015:1), Laporan keuangan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

### 2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan bagi penggunanya, baik internal maupun eksternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Murhadi (2015 : 1) “tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan.”

Menurut Kasmir (2016 : 11) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis pendapatan dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Mahmudi (2016: 4) adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja menejerial dan organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta perubahannya. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan informasi keuangan lainnya kepada pihak manajemen perusahaan atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan juga merupakan alat akuntabilitas publik.

### 2.1.3 Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Darise, 2008: 238).

Dalam Mahmudi (2016: 61), jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk)
5. Lampiran Laporan Keuangan BUMD

Dari kelima jenis laporan tersebut, biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya tiga laporan utama saja yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus. Pengertian dari tiga laporan utama, antara lain:

1. Pengertian Neraca (*Balance Sheet*)

Menurut Kasmir (2016: 28), Neraca (*Balance Sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu . Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah

dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

Menurut Darise (2008: 240), Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Dari beberapa pengertian neraca, dapat disimpulkan bahwa pengertian neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta dan memberikan informasi bagi penggunaanya dalam periode tertentu.

## 2. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2010: 387), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisish antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode.

Menurut Darise (2008:239), Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.

Kesimpulan dari beberapa pengertian laporan realisasi diatas adalah laporan keuangan yang mengungkap/ menyajikan/ menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan dari organisasi sektor publik atau

sektor swasta dan juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber.

## **2.2 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik secara internal perusahaan maupun dibandingkan dengan industrinya. Hal ini berguna bagi perkembangan perusahaan untuk mengetahui seberapa efektifkah perusahaan bekerja. Beberapa pengertian analisis laporan keuangan menurut para ahli:

Menurut Harahap (2015: 190), analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan (*financial statement*) menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Menurut Herry (2015: 132), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut guna memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Sedangkan pengertian analisis laporan keuangan menurut Munawir (2015: 35), “Penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan dan

tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis laporan keuangan adalah proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat memahami posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan perusahaan dengan mempelajari hubungan data keuangan dalam suatu laporan keuangan perusahaan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pada organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta.

### **2.2.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan**

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2016: 68) tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan, antara lain:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode,
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan,



3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki,
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini,
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal,
6. Digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan, untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan, serta untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan pada masa mendatang.

### **2.2.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2016: 68) dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis vertikal (Dinamis)

Analisis vertikal (Dinamis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.

## 2. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode analisis laporan keuangan terbagi menjadi analisis vertikal dan horizontal. Dimana analisis vertikal yaitu analisis yang dilakukan suatu periode laporan keuangan saja sedangkan analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode, menggambarkan informasi perusahaan yang sama tetapi untuk periode waktu yang berbeda.

### **2.3 Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik**

#### **2.3.1 Pihak – pihak yang berkepentingan terhadap Analisis Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Widodo dalam Halim dan Kusufo, 2012, pihak – pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut melalui analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), sebagai wakil dari pemilik daerah.
2. Eksekutif, sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan Kreditor (Misal pemegang obligasi pemerintah).

### **2.3.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik**

Menurut Mahmudi (2016), teknik analisis laporan keuangan organisasi sektor publik adalah sebagai berikut :

#### **1. Analisis Aset**

Analisis aset dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu, bagaimanakah skala ekonomi pemerintah daerah dan kondisi keuangannya.

#### **2. Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana**

Analisis utang sangat penting bagi calon pemberi pinjaman (kreditor) dalam membuat keputusan kredit, sedangkan bermanfaat untuk mengetahui beban utang, kesinambungan fiskal, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi komposisi ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui orientasi alokasi dana pemerintah daerah yaitu seberapa besar dana yang ditanamkan untuk operasional rutin, dan seberapa dalam bentuk investasi.

### 3. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai daerah.

### 4. Analisis Belanja

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Belanja daerah perlu memperoleh perhatian lebih besar karena belanja daerah lebih rawan mengalami kebocoran anggaran dibandingkan kebocoran pada sisi pendapatan.

### 5. Analisis Pembiayaan

Informasi pembiayaan penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat. Struktur pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah yang juga berpengaruh pada tingkat rasio daerah.

### 6. Analisis Laporan Arus Kas

Dalam membaca dan memahami laporan arus kas, fokus perhatian hendaknya tidak ditujukan pada jumlah kenaikan atau penurunan kas selama satu periode, karena jumlah arus kas neto saja kurang memberi informasi yang

bermakna. Yang paling penting justru informasi dari masing-masing komponen arus kas secara individual.

### **2.3.3 Analisis Aset**

Menurut Mahmudi (2016: 97), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya.

Analisis Aset terdiri dari beberapa teknik, menurut Mahmudi (2016) antara lain :

1. Analisis Pertumbuhan Tiap-tiap Pos Aset dalam Neraca

Tujuan melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca adalah untuk mengetahui perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berturutan, apakah terjadi kenaikan atautkah penurunan. Secara umum, kenaikan aset tahun sekarang dari tahun sebelumnya memberikan kesan positif yang menunjukkan adanya kemajuan atau pertumbuhan aset. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan aset, maka itu berarti sinyal negatif mungkin telah terjadi kemunduran, penurunan nilai aset, penggerogotan aset, dan inefisiensi dalam pengelolaan aset.

## 2. Analisis Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset

Analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih global. Apakah kelompok aset tertentu terlalu besar sehingga kurang baik bagi kesehatan keuangan organisasi. Sebagai contoh, jika aset pemerintah daerah sebagian besar berupa aset lancar, maka hal itu kurang menguntungkan jika dilihat dari kacamata manajemen keuangan daerah dan manajemen kas karena keuangan terlalu likuid (*overliquid*). Sebaliknya, jika sebagian besar aset merupakan aset tetap, sementara itu aset lancar kecil, maka keadaan tersebut juga akan mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah yaitu kondisi keuangan menjadi tidak likuid (*illiquid*).

## 3. Analisis Modal Kerja (*Working Capital*)

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan dan penggunaan pembiayaan lainnya. Analisis modal kerja merupakan suatu ukuran arus kas bukan sebagai rasio. Hasil analisis modal harus membarikan nilai positif. Secara umum, semakin tinggi modal kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik.

## **2.4 Analisis Rasio Keuangan**

### **2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2015:104) adalah:

Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.

Menurut Harahap (2015:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Menurut Herry (2015:162) rasio keuangan merupakan alat utama untuk melakukan analisis keuangan dan memiliki beberapa kegunaan.

Menurut Mahmudi (2016: 920), Rasio - rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain:

#### **A. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis likuiditas ada beberapa rasio yang bisa dipelajari, yaitu:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Nilai standar rasio lancar yang dianggap lancar adalah 2:1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1:1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar.

b. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah.



c. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio cepat membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1: 1.

d. *Working Capital to Total Assets*

$$\text{Working Capital to Total Assets} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

*Working capital to total assets* adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

a. Rasio Utang (*Leverage*)

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dan yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang, dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan penggabungan dua angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

###### **3.1.1.1 Sejarah KPPN Bandung I**

Awal pembentukan KPPN Bandung I dimulai pada tahun 1965 berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1964 Nomor PKN/1/6/4 dan mulai beroperasi pada Januari 1965 dengan nomenklatur pada saat itu yaitu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

Dalam sejarah perjalanannya sejak Januari 1965 sampai saat ini, KPPN Bandung I telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur mulai dengan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi Kantor Bendahara Negara, selanjutnya pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan Negara dan pada tahun 1990 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sekaligus memisahkan KPKN Bandung I dan KPKN Bandung II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 nomor 645/KMK.01/1989.

Sejalan dengan pengembangan Organisasi pada Tahun 2002 KPKN Bandung II bergabung dengan KPKN Bandung I dan menjadi KPKN Bandung. Pada tahun 2004 KPKN berubah lagi nomenklaturnya menjadi KPPN Bandung. Kemudian, untuk lebih meningkatkan mutu

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 KPPN Bandung pecah menjadi KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.

### **3.1.1.2 Visi dan Misi KPPN Bandung I**

Adapun visi dan misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, yaitu sebagai berikut :

#### **Visi**

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat daerah.

#### **Misi**

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal.
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.
4. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal profesional dan modern.

### **3.1.1.3 Struktur Organisasi KPPN Bandung I**

KPPN Bandung I adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, KPPN Bandung I memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Daftar Gambar 3.1.1.3 Struktur Organisasi KPPN Bandung I



#### 3.1.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi KPPN Bandung I

Kepala Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Bandung I mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum,
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta
3. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku (Bendahara Umum Negara);
3. Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara dari Kas Negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN);
8. Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

### 3.1.1.5 Wilayah dan Mitra Kerja KPPN Bandung I

Kewenangan Wilayah Kerja KPPN Bandung I meliputi :

No	Wilayah	Kode Kewenangan					Jumlah
		KP	KD	DK	TP	UB	
1.	Provinsi Jawa Barat	-	3	36	5	-	44
2.	Kota Bandung	18	96	-	-	-	114
3.	Kab. Bandung	-	7	-	2	-	9
4.	Kab. Bandung Barat	1	14	-	-	1	16
5.	Kota Cimahi	-	7	-	-	-	7
6.	Kab. Sumedang	-	2	-	-	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>129</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>192</b>

Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Bandung I

Wilayah kerja KPPN Bandung I meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi terdiri dari Kementerian sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (Bagian Anggaran 004)
2. Kementerian Dalam Negeri (010)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Bagian Anggaran 013)
4. Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015)
5. Kementerian Pertanian (Bagian Anggaran 018)
6. Kementerian Perindustrian (Bagian Anggaran 019)
7. Kementerian ESDM (Bagian Anggaran 020)
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bagian Anggaran 023)
9. Kementerian Kesehatan (Bagian Anggaran 24)
10. Kementerian Ketenagakerjaan (Bagian Anggaran 026)

11. Kementerian Sosial (Bagian Anggaran 027)
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bagian Anggaran 029)
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bagian Anggaran 032)
14. Kementerian Pariwisata (Bagian Anggaran 040)
15. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bagian Anggaran 042)
16. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bagian Anggaran 055)
17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Bagian Anggaran 056)
18. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Bagian Anggaran 057)
19. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bagian Anggaran 060)
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bagian Anggaran 065)
21. Badan Narkotika Nasional (Bagian Anggaran 066)
22. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bagian Anggaran 067)
23. Komisi Pemilihan Umum (Bagian Anggaran 076)
24. Kementerian Perdagangan (Bagian Anggaran 090)
25. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Bagian Anggaran 092)
26. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bagian Anggaran 104)
27. Badan SAR Nasional (Bagian Anggaran 107)
28. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Bagian Anggaran 116)
29. Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Bagian Anggaran 117)



## 3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan laporan keuangan KPPN Bandung I berupa neraca tahun anggaran 2017-2019, maka perhitungan analisis laporan keuangan sebagai berikut:

### 3.2.1 Analisis Aset

Langkah-langkah dalam melakukan analisis aset, antara lain:

- 1) Membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode) .

Berdasarkan informasi dalam Neraca KPPN Bandung I tahun 2017-2018, deskripsi dari hasil Perbandingan nilai tiap-tiap aset dalam Neraca KPPN Bandung I :

1. Perbandingan nilai tiap-tiap aset dalam Neraca KPPN Bandung I tahun 2017-2018. Berdasarkan pengolahan data dengan membandingkan nilai pos aset dalam Tabel 3.1 diperoleh informasi bahwa pertumbuhan aset KPPN Bandung I tahun 2017-2018 adalah sebesar 38.05%. Angka pertumbuhan aset tersebut dapat dikategorikan pertumbuhan aset yang baik atau terjadi peningkatan aset, karena menunjukkan angka positif. Jika diperhatikan secara cermat, pertumbuhan aset tersebut dipengaruhi oleh peningkatan semua pos neraca kecuali Asset Lancar turun sebesar 28.11%. Peningkatan pos neraca tahun 2018 paling besar pada Asset Tetap sebesar 106.82%. Kesimpulannya, peningkatan aset tahun 2017 dari 2018 menunjukkan adanya pertumbuhan/

peningkatan/ kemajuan aset.

2. Perbandingan nilai tiap-tiap aset dalam Neraca KPPN Bandung I tahun 2018-2019. Berdasarkan pengolahan data dengan membandingkan nilai pos aset dalam tabel 3.2 diperoleh informasi bahwa penurunan aset KPPN Bandung I tahun 2018-2019 adalah sebesar 10.96%. Angka penurunan aset tersebut dikategorikan kurang baik, karena menunjukkan angka Negatif.

Kesimpulannya, penurunan aset tahun 2019 dari tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan aset, kemunduran nilai aset, penggerogotan aset, dan inefisiensi dalam pengolahan aset.

**TABEL 3. 1**  
**PERBANDINGAN NILAI POS ASET**  
**NERACA KPPN BANDUNG I**  
**Tahun Anggaran 2017-2018**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	2017 (a)	2018 (b)	SELISIH (c)= (ba)	DALAM % (c/a x 100%)
<b>ASET</b>				
ASET LANCAR	228,273,040	164,104,175	(64,168,865)	(28.11%)
ASSET TETAP	219,613,778	454,215,133	234,601,355	106.82%
ASET LAINNYA	0	0	0	0
Jumlah Aset	447,886,818	618,319,308	170,432,490	38.05%
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1,840,571	1,250,134	(590,437)	32.08%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1,840,571	1,250,134	(590,437)	32.08%
Jumlah Kewajiban	1,840,571	1,250,134	(590,437)	32.08%
<b>EKUITAS DANA</b>				
EKUITAS DANA LANCAR	446,046,247	617,069,174	171,022,927	38.34%
Jumlah Ekuitas Dana	446,046,247	617,069,174	171,022,927	38.34%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	447,886,818	618,319,308	170,432,490	38.05%

Sumber data: KPPN Bandung I (data yang diolah)

**TABEL 3. 2**  
**PERBANDINGAN NILAI POS**  
**ASET NERACA KPPN BANDUNG I**  
**Tahun Anggaran 2018-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	2019 (a)	2018 (b)	SELISIH (c)= (ba)	DALAM % (c/a x 100%)
<b>ASET</b>				
ASET LANCAR	134,761,250	164,104,175	(29,342,925)	(21.77%)
ASSET TETAP	422,492,163	454,215,133	(31,722,970)	(7.5%)
ASET LAINNYA	0	0	0	0
Jumlah Aset	557,253,413	618,319,308	(61,065,895)	(10.96%)
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1,284,396	1,250,134	34,262	2.66%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1,284,396	1,250,134	34,265	2.66%
Jumlah Kewajiban	1,284,396	1,250,134	34,265	2.66%
<b>EKUITAS DANA</b>				
EKUITAS DANA LANCAR	555,969,017	617,069,174	(61,100,157)	10.98%
Jumlah Ekuitas Dana	555,969,017	617,069,174	(61,100,157)	10.98%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	557,253,413	618,319,308	(61,065,895)	10.95%

Sumber data: KPPN Bandung I (data yang diolah)

- 2) Menghitung proporsi atau presentase masing – masing kelompok aset dengan total aset.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3. 3 menunjukkan aset KPPN Bandung I tahun 2017-2019 hanya terdiri dari aset lancar saja, maka hal ini kurang menguntungkan jika dilihat dari kaca mata manajemen keuangan daerah dan manajemen kas karena keuangan terlalu likuid (*overliquid*) berdasarkan Mahmudi (2016: 89).

- Menghitung modal kerja (*working capital*) yang dimiliki pemerintah daerah Rumus yang digunakan dalam menghitung modal kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Deskripsi perhitungan modal kerja KPPN Bandung I tahun 2017-2019, adalah sebagai berikut:

a. Modal Kerja Tahun 2017

Modal Kerja KPPN Bandung I dalam Tabel 3.4 menunjukkan angka positif sebesar 446,046,247, artinya modal kerja KPPN Bandung I tahun 2017 sangat besar jika dibandingkan dengan utang lancar sebesar 1,840,571.

**TABEL 3. 3**

**PROPORSI KELOMPOK ASET TERHADAP TOTAL**

**ASET NERACA KPPN BANDUNG I**

**TAHUN ANGGARAN 2017-2019**

<b>KATEGORI ASET</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>% dr</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>% dr</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>% dr</b>
		<b>Jmlh</b>		<b>Jml</b>		<b>Jml</b>
		<b>Aset</b>		<b>Aset</b>		<b>Aset</b>
Aset Lancar	447,886,818	100%	618,319,308	100%	557,253,413	100%
Rek Kas di KPPN	0	0%	0	0%	0	0%
Kas dlm Transito	0	0%	0	0%	0	0%
Kas di Bendahara						
Pengeluaran	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>447,886,818</b>		<b>618,319,308</b>		<b>557,253,413</b>	

Sumber data: KPPN Bandung I (data yang diolah)

**TABEL 3. 4**  
**MODAL KERJA**  
**NERACA KPPN BANDUNG I**  
**Tahun Anggaran 2017-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

KETERANGAN	2017	2018	2019
Aset Lancar (a)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Kewajiban (b)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Modal Kerja (a-b)	446,046,247	617,069,174	555,969,017

Sumber data: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Hal ini menunjukkan keuangan KPPN Bandung I tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya (Mahmudi, 2016: 91), sehingga dapat disimpulkan bahwa modal kerja rendah menunjukkan likuiditas KPPN Bandung I tahun 2017 kurang baik. Aset lancar yang dimiliki KPPN Bandung I tahun 2017 sebesar 447,886,818 menunjukkan posisi positif.

b. Modal Kerja Tahun 2019

Modal kerja KPPN Bandung I dalam Tabel 3. 4 menunjukkan angka positif 555,969,017 menunjukkan modal kerja KPPN Bandung I tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa modal kerja rendah menunjukkan likuiditas KPPN Bandung I tahun 2019

kurang baik. Aset lancar yang dimiliki KPPN Bandung I tahun 2019 sebesar 557,253,413 menunjukkan posisi angka positif, sehingga bisa dikatakan aset KPPN Bandung I cukup untuk membiayai semua kegiatan atau pengeluaran dan kewajiban pada tahun 2019.

Kesimpulan dari deskripsi modal kerja KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan angka positif pada tahun 2017-2019, ini menunjukkan likuiditas selama 2 tahun tersebut berarti likuiditas membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Penilaian likuiditas baik atau buruk berdasarkan Mahmudi (2016: 91) bahwa semakin tinggi modal kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik.

### **3.2.2 Analisis Rasio Keuangan**

Menghitung analisis rasio keuangan merupakan bagian atau langkah selanjutnya dalam melakukan analisis aset. Berdasarkan data dalam neraca KPPN Bandung I tahun 2017-2019, maka perhitungan rasio keuangan yang relevan pada KPPN Bandung I tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- **Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas mengukur kemampuan KPPN Bandung I dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berikut ini perhitungan rasio likuiditas KPPN Bandung I tahun 2017-2019:

- a. **Rasio Lancar**

Rasio lancar mengukur kesehatan keuangan KPPN



Bandung I dengan menunjukkan apakah KPPN Bandung I memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

**TABEL 3.5**

**RASIO LANCAR**

**NERACA KPPN BANDUNG I**

**Tahun Anggaran 2017-2019**

**(Dalam Rupiah)**

<b>KETERANGAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aktiva Lancar (a)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Utang Lancar (b)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Rasio Lancar (a/b)	243,34	494,60	433,86
Naik atau (turun)		251,26	-60,74

Sumber data: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2017 dalam Tabel 3.5 sebesar 243,34, hal ini menunjukkan keuangan KPPN Bandung I tahun 2017 lancar, karena menurut Mahmudi (2016: 93) rasio lancar dianggap aman adalah 2:1 dan nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1:1. Rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2017 sebesar 243,34 mempunyai arti bahwa jumlah aktiva lancar (aset lancar) yang dimiliki KPPN Bandung I sebesar 243,34 kali utang lancarnya (kewajiban jangka pendek), atau setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp 243,34 aset lancar.

Rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2018 dalam Tabel 3. 5 sebesar 494,60 hal

ini menunjukkan keuangan KPPN Bandung I tahun 2018 lancar. Rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2018 sebesar 494,60 mempunyai arti bahwa jumlah aktiva lancar (aset lancar) yang dimiliki KPPN Bandung I sebesar 494,60 kali utang lancarnya (kewajiban jangka pendek), atau setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp 494,60 aset lancar.

Rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2019 dalam Tabel 3. 5 sebesar 433,86 hal ini menunjukkan keuangan KPPN Bandung I tahun 2019 lancar. Rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2019 sebesar 433,86 mempunyai arti bahwa jumlah aktiva lancar (aset lancar) yang dimiliki KPPN Bandung I sebesar 433,86 kali utang lancarnya (kewajiban jangka pendek), atau setiap Rp 1 hutang lancar dijamin dengan Rp 433,86 aset lancar.

Kesimpulan dari rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2017 - 2018 menunjukkan pada tahun 2017 rasio lancar turun sebesar 243,34 namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 251,26. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPPN Bandung I tahun 2017 kurang baik, pada tahun 2018 membaik, sehingga terjadi peningkatan atau perbaikan kesehatan atau kinerja keuangan KPPN Bandung I.

b. Rasio Kas

Rasio kas mengukur kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki KPPN Bandung I. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio kas KPPN Bandung I tahun 2017 dalam Tabel 3. 5 sebesar 243,34 menunjukkan bahwa setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp 243,34 kas ditambah efek.

Rasio kas KPPN Bandung I tahun 2018 dalam Tabel 3. 6 sebesar 494,60 menunjukkan bahwa setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp 494,60 kas ditambah efek.

**TABEL 3. 6**

**RASIO KAS**

**NERACA KPPN BANDUNG I**

**Tahun Anggaran 2017-2019**

**(Dalam Rupiah)**

<b>KETERANGAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Total Kas (a)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Utang Lancar (b)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Rasio Kas (a/b)	243,34	494,60	433,86
Naik atau (turun)		251,26	-60,74

Sumber dana: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Rasio kas KPPN Bandung I tahun 2017 dalam Tabel 3. 6 sebesar 243,34 menunjukkan bahwa setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp 243,34 kas ditambah efek. Kesimpulan dari rasio kas KPPN Bandung I tahun 2017-2019

mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 251,26 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -60,74 sehingga dapat disimpulkan kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dalam keadaan baik karena rasio kas lebih dari 1:1.

c. Rasio Cepat

Rasio cepat mengukur kecepatan KPPN Bandung I dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio cepat KPPN Bandung I tahun 2017 dalam Tabel 3.7 sebesar 243,34 hal ini menunjukkan kemampuan yang kurang baik dalam melunasi utang lancar karena nilai rasio cepat yang dianggap baik adalah 1:1 atau Rp 1 utang lancar dijamin Rp 243,34 aktiva lancar dikurangi persediaan.

Rasio cepat KPPN Bandung I tahun 2017 dalam Tabel 3.7 sebesar -7,92 hal ini menunjukkan kemampuan yang kurang baik dalam melunasi utang lancar karena nilai rasio cepat yang dianggap baik adalah 1:1 atau Rp 1 utang lancar dijamin Rp -7,92 aktiva lancar dikurangi persediaan.

**TABEL 3. 7**  
**RASIO CEPAT**  
**NERACA KPPN BANDUNG I**  
**Tahun Anggaran 2017-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

KETERANGAN	2017	2018	2019
Aktiva Lancar (a)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Persediaan (b)	0	0	0
Selisih (c)=(ab)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Utang Lancar (d)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Rasio Cepat (c/d)	243,34	494,60	433,86
Naik atau (turun)	7,79	251,26	-60,74

Sumber data: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Rasio cepat KPPN Bandung I tahun 2017 dalam Tabel 3.7 sebesar 243,34 hal ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam melunasi utang lancar karena nilai rasio cepat yang dianggap baik adalah 1:1 atau Rp 1 utang lancar dijamin Rp 3,91 aktiva lancar dikurangi persediaan.

Kesimpulan dari rasio cepat KPPN Bandung I tahun 2017-2019 adalah rasio cepat pada tahun 2017-2018 ada kenaikan nilai rasio cepat sebesar 251,26 hal ini menunjukkan dalam dua tahun tersebut KPPN Bandung I mempunyai kemampuan baik dalam membayar utang lancar. Kenaikan rasio cepat sebesar 251,60 disebabkan karena pada tahun 2017-2019 KPPN Bandung I mempunyai aset lancar dengan angka positif. Jadi dapat disimpulkan

kemampuan dalam membayar atau melunasi utang lancar KPPN baik dan tampak adanya perbaikan kinerja keuangan sehingga rasio cepat pada tahun 2018 meningkat.

d. *Working Capital to Total Assets (W C to T A)*

*Working Capital to Total Assets* mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Rumus yang digunakan dalam menghitung *Working Capital to Total Assets* adalah sebagai berikut:

$$\textit{Working Capital to Total Assets} = \frac{\textit{Aktiva Lancar} - \textit{Utang Lancar}}{\textit{Total Aktiva}}$$

**TABEL 3. 8**  
**RASIO *WORKING CAPITAL* to *ASSETS***  
**NERACA KPPN BANDUNG I**  
**Tahun Anggaran 2017-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

KETERANGAN	2017	2018	2019
Aktiva Lancar (a)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Utang Lancar (b)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Selisih (c)=(ab)	446,046,247	617,069,174	555.969.017
Total Aktiva (d)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Rasio <i>WC to TA</i> (c/d)			
x 100%	99,58%	99,79%	99,77%
Naik atau (turun)		0,21%	-0,02%

Sumber data: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Rasio *Working Capital to Total Assets* tahun 2017 dalam Tabel 3.8 sebesar 99,58%, hal ini menunjukkan bahwa Rp 100 total aktiva mewakili modal kerja neto sebesar Rp 99,58.

Rasio *Working Capital to Total Assets* tahun 2018 sebesar 99,79% hal ini menunjukkan bahwa Rp 100 total aktiva mewakili modal kerja neto sebesar Rp 99,79. Rasio *Working Capital to Total Assets* tahun 2019 dalam Tabel 3. 8 sebesar 99,77% hal ini menunjukkan bahwa Rp 100 total aktiva mewakili modal kerja neto sebesar Rp .99,77.

Kesimpulan dari hasil perhitungan *Working Capital to Total Assets* KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan pertumbuhan/kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,21% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02%. Tingginya Rasio *Working Capital to Total Assets* menunjukkan likuiditas yang kurang baik, karena kisaran aman *Rasio Working Capital to Total Assets* sebesar 5-15% dari total aset.

- **Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan KPPN Bandung I dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas KPPN Bandung I 2017 dalam Tabel 3.9 sebesar 243,34 menunjukkan bahwa setiap Rp 243,34 aktiva menjamin Rp 1 utang lancar KPPN Bandung I, hal ini menunjukkan bahwa total aktiva (aset) tahun 2017 sebesar Rp 447,886,818 lebih besar dari total utang (kewajiban) sebesar Rp 1,840,571. Rasio solvabilitas KPPN Bandung I 2018 dalam Tabel 3.9 sebesar menunjukkan bahwa setiap Rp 494,60 aktiva menjamin Rp 1 utang lancar KPPN Bandung I, hal ini menunjukkan bahwa total aktiva (aset) tahun 2018 sebesar Rp 618,319,308 lebih besar dari total utang (kewajiban) sebesar Rp 1,250,134.



**TABEL 3. 9**  
**RASIO SOLVABILITAS**  
**NERACA KPPN BANDUNG I**  
**Tahun Anggaran 2017-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

KETERANGAN	2017	2018	2019
Total Aktiva (a)	447,886,818	618,319,308	557,253,413
Total Utang (b)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Rasio Solvabilitas (a/b)	243,34	494,60	433,86
Naik atau (turun)		251,26	-60,74

Sumber data: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Rasio solvabilitas KPPN Bandung I 2019 dalam Tabel 3.9 sebesar 433,86 menunjukkan bahwa setiap Rp 433,86 aktiva menjamin Rp 1 utang KPPN Bandung I, hal ini menunjukkan bahwa total aktiva tahun 2019 sebesar Rp 557,253,413 lebih besar dari total utang (kewajiban) sebesar Rp 1,284,396.

Kesimpulan dari hasil perhitungan rasio solvabilitas KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 sebesar 251,26 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 60,74 sehingga pada tahun 2018-2019 aktiva (aset) lebih kecil daripada utang (kewajiban), sedangkan pada tahun 2018 aktiva (aset) lebih besar daripada utang (kewajiban). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan kemampuan KPPN Bandung I dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Edy

(2005: 50), apabila angka rasio yang diperoleh lebih besar dari 1 maka berarti total aset lebih besar dari utang.

a. Rasio Utang

Rasio utang mengukur kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utangnya. Berikut ini perhitungan rasio utang yang relevan dengan KPPN Bandung I tahun 2017-2019, yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

**TABEL 3.10**

**RASIO UTANG TERHADAP EKUITAS**

**NERACA KPPN BANDUNG I**

**Tahun Anggaran 2017-2019**

**(Dalam Rupiah)**

<b>KETERANGAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Total Utang (a)	1,840,571	1,250,134	1,284,396
Jumlah Ekuitas Dana (b)	446,046,247	617,069,174	555,969,017
Rasio Utang thp Ekuitas (a/b)	0,004	0,002	0,0023
Naik atau (turun)		0,002	0,0003

Sumber data: KPPN Bandung I (Data yang diolah)

Rasio utang terhadap ekuitas tahun 2017 dalam Tabel sebesar 0,004 hal ini berarti setiap Rp 0,004 utang KPPN Bandung I dijamin oleh Rp 1 ekuitas dana, hal ini menunjukkan kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utang (kewajiban) baik. Rasio utang terhadap ekuitas tahun 2018 dalam 3.10 sebesar 0,002 hal ini berarti setiap Rp 0,002 utang KPPN Bandung I dijamin oleh Rp 1 ekuitas dana, hal ini menunjukkan kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utang (kewajiban) baik. Rasio utang terhadap ekuitas tahun 2019 Tabel 3.10 sebesar 0,0023 hal ini berarti setiap Rp 0,0023 utang KPPN Bandung I dijamin oleh Rp 1 ekuitas dana, hal ini menunjukkan kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utang (kewajiban) baik.

Kesimpulan rasio utang terhadap ekuitas KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan kecilnya rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2017-2019 berarti kecilnya utang yang dimiliki KPPN Bandung I, namun pada tahun 2007 rasio utang terhadap ekuitas KPPN Bandung I meningkat sebesar 0,002 dan pada tahun 2019 sebesar 0,003.

Maka dapat disimpulkan setiap dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang kecil atau menunjukkan hanya sebagian kecil ekuitas dana yang terbebani utang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Analisis laporan keuangan pada laporan keuangan KPPN Bandung I tahun anggaran 2017-2019 memperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode) .
  1. diperoleh informasi bahwa pertumbuhan aset KPPN Bandung I tahun 2017-2018 adalah sebesar 38.05%. Angka pertumbuhan aset tersebut dapat dikategorikan pertumbuhan aset yang baik atau terjadi peningkatan aset, karena menunjukkan angka positif.
  2. Perbandingan nilai tiap-tiap aset dalam Neraca KPPN Bandung I tahun 2018-2019.

diperoleh informasi bahwa penurunan aset KPPN Bandung I tahun 2018-2019 adalah sebesar 10.96%. Angka penurunan aset tersebut dikategorikan buruk, karena menunjukkan angka Negatif.

2. Menghitung proporsi atau presentase masing – masing kelompok aset dengan total aset
  1. Modal Kerja Tahun 2017

- 2 menunjukkan angka positif sebesar 446,046,247, artinya modal kerja KPPN Bandung I tahun 2017 sangat besar jika dibandingkan dengan utang lancar sebesar 1,840,571.
3. Analisis Rasio Keuangan
  - dari rasio lancar KPPN Bandung I tahun 2017-2018 menunjukkan pada tahun 2017 rasio lancar turun sebesar 243,34 namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 251,26. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPPN Bandung I tahun 2017 kurang baik, pada tahun 2018 membaik, sehingga terjadi peningkatan atau perbaikan kesehatan atau kinerja keuangan KPPN Bandung I.
  - rasio kas KPPN Bandung I tahun 2017-2019 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 251,26 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -60,74 sehingga dapat disimpulkan kemampuan KPPN Bandung I dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dalam keadaan baik karena rasio kas lebih dari 1:1.
  - rasio cepat KPPN Bandung I tahun 2017-2019 adalah rasio cepat pada tahun 2017-2018 ada kenaikan nilai rasio cepat sebesar 251,26 hal ini menunjukkan dalam dua tahun tersebut KPPN Bandung I mempunyai kemampuan baik dalam membayar utang lancar. Kenaikan rasio cepat sebesar 251,26 disebabkan karena

pada tahun 2017-2019 KPPN Bandung I mempunyai aset lancar dengan angka positif. Jadi dapat disimpulkan kemampuan dalam membayar atau melunasi utang lancar KPPN baik dan tampak adanya perbaikan kinerja keuangan sehingga rasio cepat pada tahun 2018 meningkat.

- dari hasil perhitungan *Working Capital to Total Assets* KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan pertumbuhan/kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,21% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02%. Tingginya Rasio *Working Capital to Total Assets* menunjukkan likuiditas yang kurang baik, karena kisaran aman Rasio *Working Capital to Total Assets* sebesar 5-15% dari total aset.
- dari hasil perhitungan rasio solvabilitas KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 sebesar 251,26 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -60,74 sehingga pada tahun 2018-2019 aktiva (aset) lebih kecil daripada utang (kewajiban), sedangkan pada tahun 2018 aktiva (aset) lebih besar daripada utang (kewajiban). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan kemampuan KPPN Bandung I dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

- rasio utang terhadap ekuitas KPPN Bandung I tahun 2017-2019 menunjukkan kecilnya rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2017-2019 berarti kecilnya utang yang dimiliki KPPN Bandung I, namun pada tahun 2017 rasio utang terhadap ekuitas KPPN Bandung I meningkat sebesar 0,002 dan pada tahun 2019 sebesar 0,003.

#### 4.2 Saran

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini baik dari ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, serta masih terbatasnya variable yang diteliti. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa masukan yang perlu diperhatikan :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan dan memperkuat hasil penelitian ini dengan memperluas area penelitian ini dengan memperluas area penelitian, tidak hanya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, harus meningkatkan pertumbuhan asetnya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset agar tidak terjadi penurunan aset.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, harus meningkatkan kinerja keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: PT Indeks.
- Ditjen Perbendaharaan. 2018. *Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung* I. [www.ditjenperbendaharaan.go.id](http://www.ditjenperbendaharaan.go.id). 15 Agustus 2020.
- Edy, Gede Prasetya. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016*.  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6400/skripsi%20Analisis%200Kinerja%20Keuangan%20Pada%20Pemerintah%20Daerah%20Kab.pdf?sequence=1>. 21 Maret 2020.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafari. 2015. *Analisis Kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Herry. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS. Yogyakarta: Tri Admojo.



- Kasmir. 2015 . *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Kasmir. 2016 . *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Listiyani Natalia, Tutut Dewi Astuti. 2016. *Jurnal SosioHumaniora*.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+analisis+laporan+keuangan+pemerintah&hl=id&as\\_sdt=0&as\\_vis=1&oi=scholart#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DhXML767iscMJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+analisis+laporan+keuangan+pemerintah&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DhXML767iscMJ). 20 Juli 2020.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPT STIM YPKN.
- Munawir, S. 2015 . *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2016 . *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Murhadi, Werner R. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Rokan Hulu*.  
[https://media.neliti.com/media/publications/109652-ID-analisis-laporan-keuangan-untuk -mengukur.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/109652-ID-analisis-laporan-keuangan-untuk-mengukur.pdf). 21 Maret 2020.
- Rahayu.2018. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/download/4849/3223/>. 21 Maret 2020.
- Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta

**NERACA**  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DES 2017  
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB  
Tanggal : 22-01-2018  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON 1 :08 DITJEN PERBENDAHARAAN  
WILAYAH/PROVINSI :1200 Kanwil XII Bandung  
SATUAN KERJA :527102 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I  
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2017	31 DES 2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	228,273,040	254,882,535	(26,609,495)	(10)
<b>Jumlah ASET LANCAR</b>	<b>228,273,040</b>	<b>254,882,535</b>	<b>(26,609,495)</b>	<b>(10)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	4,399,993,551	4,366,547,243	33,446,308	1
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,180,379,773)	(4,000,601,652)	(179,778,121)	4
<b>Peralatan dan Mesin (Netto)</b>	<b>219,613,778</b>	<b>365,945,591</b>	<b>(146,331,813)</b>	<b>(40)</b>
<b>Jumlah ASET TETAP</b>	<b>219,613,778</b>	<b>365,945,591</b>	<b>(146,331,813)</b>	<b>(40)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	24,466,535	24,466,535	0	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(24,466,535)	(24,466,535)	0	-
<b>Jumlah ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah ASET</b>	<b>447,886,818</b>	<b>620,828,126</b>	<b>(172,941,308)</b>	<b>(28)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,840,571	3,182,656	(1,342,085)	(42)
<b>Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,840,571</b>	<b>3,182,656</b>	<b>(1,342,085)</b>	<b>(42)</b>
<b>Jumlah KEWAJIBAN</b>	<b>1,840,571</b>	<b>3,182,656</b>	<b>(1,342,085)</b>	<b>(42)</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	446,046,247	617,645,470	(171,599,223)	(28)
<b>Jumlah EKUITAS DANA</b>	<b>446,046,247</b>	<b>617,645,470</b>	<b>(171,599,223)</b>	<b>(28)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>447,886,818</b>	<b>620,828,126</b>	<b>(172,941,308)</b>	<b>(28)</b>

Bandung, 05 Juli 2017

Kepala Kantor

Moch. Nurhidayat  
196112241985031002



**NERACA**  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2019  
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB  
Tanggal : 17-01-2020  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON 1 :08 DITJEN PERBENDAHARAAN  
WILAYAH/PROVINSI :1200 Kanwil XII Bandung  
SATUAN KERJA :527102 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I  
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
<b>ASET</b>	
ASET LANCAR	
Persediaan	134,761,250
<b>Jumlah ASET LANCAR</b>	<b>134,761,250</b>
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	5,299,307,256
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,876,815,093)
<i>Peralatan dan Mesin (Netto)</i>	<b>422,492,163</b>
<b>Jumlah ASET TETAP</b>	<b>422,492,163</b>
ASET LAINNYA	
Aset Lain-lain	21,331,903
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(21,331,903)
<b>Jumlah ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah ASET</b>	<b>557,253,413</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga I	1,284,396
<b>Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,284,396</b>
<b>Jumlah KEWAJIBAN</b>	<b>1,284,396</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	
Ekuitas	
Ekuitas	555,969,017
<b>Jumlah EKUITAS DANA</b>	<b>555,969,017</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>557,253,413</b>

Bandung, 31 Desember 2019

Kepala Kantor



Edi Nuryadi

NIP 196301061985031004



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANDUNG**

JL. ASIA AFRIKA NO. 114, BANDUNG 40261; TELEPON (022) 4230129; FAKSIMILI (022) 4240298;  
SUREL : KPPN022@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BANDUNG1

Nomor : S-1142/WPB.13/KP.01/2020 16 Maret 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Izin Survey pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I

Yth. Kepala Prodi DIII Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana  
YPKP

Sehubungan dengan Surat Kaprodi DIII Keuangan dan Perbankan Nomor SK-02/DIII  
PB/III/USBYPKP/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Permohonan Izin Survey, bersama ini kami  
menyetujui pelaksanaan survey/penelitian ± 3 bulan kepada :

Nama : Nia Nurcahayati  
NPM : 1011171013

demikian kelancaran survey/penelitian, diharapkan untuk tetap menjaga etika akademik dan  
ketentuan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Bandung I



Ditandatangani secara elektronik  
Edi Nuryadi

